

**IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DENGAN INVESTASI
TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DALAM TINJAUAN ISLAM
(STUDI KASUS DESA ULUMAHUAM)**

Yungki Akbar¹, Hendra Harmain², Arnida Wahyuni Lubis³

¹Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Medan

Email:yungkiakbar90@gmail.com

²Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Medan

Email:hendra.harmain@uinsu.ac.id

³Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara, Medan

Email:arnidawahyuni@yahoo.com

Abstract

In this case it refers to the village government in an effort to implement SAP by investing in government performance. The investment made greatly influences the image of the community's environmental assessment of the performance of the village government, which then becomes a benchmark for considering the achievement of this leadership. This study aims to find out how the implementation is carried out by the Ulumahuam Village Government, because there are some uniqueness or differences that occur in the Village Government in general where the hypothesis includes the level of concern, wisdom, creativity and innovation possessed by the Ulumahuam Village Government. This research methodology is quantitative with a qualitative descriptive approach, where the focus of this research is to explore the specific problems of research subjects from all aspects of personality related to the object of research, this research is also often called casuistic research. The results showed that the significance value (0.817) > 0.05 means that there is no effect of the application of government accounting standards by investment on government performance or in other words it can be concluded that the application of SAP through investment is not in accordance with government performance.

Kata Kunci: Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Standar Akuntansi Pemerintah Investasi, Kinerja Pemerintah Desa.

1. PENDAHULUAN

Seiring berjalannya perkembangan zaman dari masa ke masa mulai dari era 90-an hingga kini terdapat pembaharuan dari berbagai sektor dan aspek, salah satunya adalah dari sektor akuntabilitas. Secara fundamental Akuntabilitas tidak hanya didasarkan sebagai sistem pencatatan dari dan dalam instansi pemerintahan juga perusahaan. Namun, pada zaman ini sudah mengalami inovasi dalam tubuh akuntansi dimana sudah terdapat regulasi dari pemerintah Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang sistem pencatatan akuntansi, perlakuan, pengakuan dan sebagainya yang Validitas nya sudah diakui. Pemeliharaan barang/produk dalam suatu

pemerintahan juga bervariasi dan terdapat beberapa tingkatannya masing-masing.

Di Negara Indonesia terdapat pemerintah desa, pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Meskipun diatur dalam UU untuk regulasi setiap pemerintahan, Namun setiap instansi pemerintahan tidak dilarang melakukan tindakan konsumtif selagi masih diambang batas kewajaran. Dapat diartikan konsumtif dalam hal ini adalah melakukan pembelian/belanja peralatan dan perlengkapan utama maupun pendukung yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan di pemerintahan.

Pengalokasian dana di pemerintahan

juga dapat dilakukan dengan fleksibel menyesuaikan karakter lingkungan dan tidak bersifat stagnan. Investasi adalah salah satu program yang selalu ada di ranah pemerintahan baik tingkat pusat, daerah, kabupaten/kota dan desa. Strategi dalam melakukan investasi masing masing instansi pemerintahan juga variatif untuk memenuhi aspek aspek kebutuhan lingkungan masyarakat dan pemerintahan. Dalam hal ini merujuk kepada pemerintahan desa dalam upaya Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dengan Investasi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa.

Investasi yang dilakukan sangat berpengaruh terhadap citra penilaian lingkungan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa yang kemudian menjadi tolak ukur pertimbangan pencapaian atau prestasi atas kepemimpinan tersebut. Kinerja Pemerintah sejatinya akan dipertanggungjawabkan dan di evaluasi apakah sudah memenuhi dan menjawab permasalahan yang ada atau sebaliknya.

Maka perlu adanya pola pikir yang kreatif dan inovatif dalam tubuh pemerintahan desa sebagai bahan dalam program pengalokasian dana khususnya terhadap investasi, baik investasi secara produktif maupun normatif yang secara akuntabilitas tercatat transparan serta tidak ada maksud dan tujuan melakukan tindakan secara personal menguntungkan beberapa pihak juga merugikan lingkungan masyarakat dan negara. Transparansi dan Akuntabel dalam penyajian data perihal investasi juga diperhatikan dan diharapkan oleh masyarakat setempat untuk mengetahui, mengukur dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa dalam periode berjalan.

Kendati demikian, Investasi juga dapat ditemukan dalam ajaran islam yang mengatur kegiatan tersebut dengan tetap memperhatikan nilai-nilai keislaman nya agar tidak melenceng dari syariat. Telah dijelaskan dan terdapat beberapa sumber yakni al-qur'an, Hadits dan menurut banyak ahli dalam islam sehingga apapun yang dikerjakan dengan strategi maksimal khususnya investasi tetap ada hukum dan dasarnya secara syariat

dan nilai-nilai keislaman.

Peneliti dalam hal ini menemukan suatu gagasan yang terdapat di Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam upaya Investasi Pemerintah Desa yang di proyeksikan untuk kebutuhan desa dan masyarakat melalui rancangan Kepala Desa dan jajarannya. Jika ditarik dari rumusan masalah yang ditemukan penulis dari Pemerintah Desa tersebut dapat diuraikan diantaranya :

- a) Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terkait Investasi di Desa Ulumahuam sudah sesuai dengan ketentuan PSAK di Indonesia ?
- b) Apakah Investasi yang dilakukan Pemerintah Desa Ulumahuam memberikan manfaat ke seluruh elemen Desa (Masyarakat Desa, Perangkat Desa dan Pemerintah Desa)
- c) Apakah Investasi yang dilakukan Pemerintah Desa Ulumahuam memberikan keuntungan secara finansial terhadap Desa Ulumahuam?

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui strategi dan cara dari implementasi yang dilakukan Pemerintah Desa Ulumahuam yang menurut Peneliti terdapat beberapa keunikan atau perbedaan yang terjadi di Pemerintahan Desa pada umumnya dimana suatu hal tersebut terbersit oleh Peneliti sebagai sebuah hipotesis yang mencakup tingkat kepedulian, kearifan, kreatifitas dan inovatif yang dipunyai oleh Pemerintah Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Dalam upaya mencari kebenaran fakta di lapangan di butuhkan suatu interaksi antar Peneliti dengan tempat lokasi penelitian atau dalam hal ini komunikasi langsung dengan beberapa Perangkat Desa untuk mendapatkan data primer yang akan di sajikan dalam naskah. Peneliti melakukan observasi dengan turun langsung ke kantor desa untuk bertanya dan menjawab pertanyaan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kepala Urusan Bagian Umum Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

(Endah Christianingsih, 2020) mendefinisikan implementasi sebagai penerapan sebuah kebijakan yang konseptual, serta diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan energi alam, manusia atau berbayar bersama dengan daftar langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan kebijakan. Serta apa yang harus dilakukan setelah sebuah kebijakan diputuskan atau diterapkan.

Dalam bukunya “Kondisi Aplikasi Berdasarkan Kurikulum”, Nurdin Usman menawarkan pandangan tentang implementasi, dengan alasan bahwa implementasi berpusat pada aktivitas, perilaku, tindakan atau metode sistem. Implementasi ini juga lebih dari sekedar aktivitas dan juga merupakan kegiatan yang direncanakan dan berguna untuk mencapai tujuannya. (Fatimah, 2021)

Defenisi menurut (agindawati, I. N, 2019), Implementasi merupakan tahapan dalam proses pembuatan kebijakan publik biasanya diterapkan setelah kebijakan dibuat. Penerapan strategi pada dasarnya adalah teknik bagaimana kelihaihan mencapai tujuannya dan struktur di balik pengembangannya melalui penerapan langsung juga perumusan strategi.

Sedangkan (dian hardiana, 2021), mendefinisikan implementasi sebagai pelaksanaan atau penerapan sebuah kebijakan dalam rangka menanggulangi sesuatu hal, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan memberikan efek perubahan lebih baik dari sebelum adanya implementasi kebijakan.

Secara Umum, Implementasi adalah kegiatan atau penggunaan suatu gagasan yang telah disusun secara cermat, hati-hati dan tuntas. Implementasi dicoba ketika ada pemrograman matang yang dikembangkan dengan baik atau konsep yang telah dipersiapkan secara ekstensif sebelumnya untuk memastikan kejelasan. Implementasi adalah pengaturan instrumen untuk mencapai sesuatu yang menyebabkan dampak atau efek pada hal tertentu. Kegiatan yang direncanakan dan dilakukan dengan cermat dan mencantumkan referensi untuk

memenuhi tujuan kegiatan pada norma-norma tertentu. Penerapan adalah tindakan dari suatu konsep yang telah dipersiapkan dengan cermat.

Berdasarkan Menurut beberapa pengertian ahli, penerapan adalah suatu cara aktif dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu kegiatan guna mencapai suatu hasil yang sejalan dengan tujuan atau sasaran kebijakan.

Menurut Moenek, Suwanda dan Rachmat (2020, hal. 37) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah Prinsip akuntansi yang digunakan untuk mengelola dan menyajikan informasi keuangan untuk otoritas pusat atau daerah. Data keuangan harus mematuhi standar akuntansi rezim hukum saat ini. Standar ini berfungsi sebagai panduan saat membuat data keuangan untuk setiap wilayah untuk memastikan tidak ada perbandingan dan semuanya sesuai dengan persyaratan.

Untuk IPSAS yang diuraikan dalam Sinurat yang cerdas (2018, hlm. 16) Premis Akumulasi adalah basis pembukuan yang melegitimasi kehadiran organisasi moneter dan peristiwa keuangan lainnya ketika organisasi dan peristiwa ini terjadi. Akibatnya, insiden dan transaksi diidentifikasi dalam data keuangan dan dicatat dalam memo akuntansi.

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022 mengenai Strategi Pembukuan Pemerintah Pusat, ia memaknai bahwa sebenarnya Modal merupakan warisan yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan finansial seperti bunga, keuntungan dan biaya, atau keuntungan yang berpotensi bersahabat, sehingga dapat membangun penguasaan otoritas publik dalam jenis-jenis penawaran bantuan kepada daerah setempat. Usaha terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu spekulasi sesaat dan spekulasi jangka panjang. Taruhan sementara adalah usaha yang dapat dicairkan dengan cepat dan direncanakan dimiliki lebih dari 3 (90 hari) sampai dengan 12 bulan (wikiapbn, 2015).

Investasi jangka pendek harus memenuhi

karakteristik sebagai berikut:

- a. Itu bisa dijual atau diperdagangkan dengan cepat dan bebas;
- b. Ditujukan dalam bagan manajemen kas, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dapat meningkatkan kapasitas produksi warisan dengan membeli modal atau menjual investasi ketika uang tunai dibutuhkan;
- c. Umumnya aman.

Jenis-jenis Investasi Jangka Pendek

Berikut adalah jenis investasi jangka pendek antara lain:

- a. Toko waktu dengan jangka waktu lebih dari 90 hari selama satu tahun serta yang dapat diperluas secara alami (rotasi toko).
- b. Permintaan Uang Muka Negara (SUN) dan Akta Bank Indonesia (SBI) sesaat.
- c. Saham dibeli dengan maksud untuk dijual kembali dalam waktu satu tahun atau kurang dari pertengahan di neraca.
- d. Saham dan obligasi.

Sumber kas yang dapat diterima termasuk warisan, pengeluaran kas, pendapatan kontribusi dalam bentuk modal, dan konversi piutang menjadi modal. Jika UI memenuhi persyaratan berikut, itu menjadi investasi jangka pendek:

- a. Otoritas dapat memperoleh manfaat ekonomi, sosial, atau potensi jasa di masa depan dari investasi ini untuk jangka waktu lebih dari tiga (3) bulan hingga dua belas (12) bulan; Dan
- b. Dimungkinkan untuk mengukur tingkat akuisisi atau tingkat modal alami dengan cara yang memadai (dapat diandalkan). Konsumsi untuk akuisisi spekulasi sementara dianggap sebagai pembayaran tunai pemerintah dan tidak diungkapkan sebagai pengeluaran atau penggunaan pendukung dalam Estimation Acknowledgment Data (LRA).

Selisihnya dicatat sebagai pelengkap atau pengurang SILPA dan sebagai informasi laba rugi operasional jika terjadi kenaikan atau penurunan dari angka yang tercatat pada saat pelepasan atau pemasaran modal jangka pendek. Manfaat dirasakan saat biaya pengiriman atau promosi (setelah

dikurangi biaya iklan) lebih besar dari jumlah yang tercatat, dan kerugian dirasakan saat biaya pengiriman atau pemasaran (setelah dikurangi biaya iklan) tidak persis sama dengan jumlah yang tercatat.

- a. Ada pasar aktif yang bisa menghasilkan angka pasar, dan ada berbagai bentuk modal. Bilangan alami diterapkan dalam contoh investasi seperti itu berdasarkan nilai pasar. Sebaliknya, angka nominal, angka terdaftar dan angka asli lainnya dapat digunakan untuk modal tanpa pasar aktif.
- b. Kepentingan sesaat sebagai pesan penting, seperti saham dan kredit (pengaruh) saat ini, dicatat sebagai biaya pengamanan. Harga perusahaan investasi itu sendiri sudah termasuk dalam biaya perolehan modal, demikian pula komisi pialang untuk jual beli, layanan bank, dan biaya lain yang menonjol dalam bagan akuisisi.
- c. Jika bunga sebagai pesan penting diperoleh tanpa biaya jaminan, maka spekulasi tersebut dinilai berasal dari nilai wajar usaha dengan syarat perolehannya setara dengan harga pasar. Jika tidak ada angka reguler, proyek dinilai berdasarkan jumlah normal dari warisan lain yang diajukan untuk spekulasi. Selain itu, jika pesan berharga diperoleh dari donasi yang tidak memiliki nilai pasar dan diperkirakan bersumber dari hasil evaluasi sesuai ketentuan.
- d. Investasi jangka pendek seperti tabungan jangka pendek atau investasi non saham dicatat sebesar nilai nominal simpanan.
- e. Pada saat pelaporan, investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan di neraca dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah Bank Esensial.

Di neraca investasi jangka pendek ditampilkan sebagai pos sederhana. Namun dalam Informasi Realisasi Perhitungan dan Informasi Operasional, hasil investasi seperti bunga dilaporkan sebagai pendapatan. Usaha

pengeluaran uang tunai untuk pengadaan usaha sementara dicatat sebagai penggantian nama uang menjadi spekulasi sesaat oleh BUN dan Badan Bantuan Standar (BLU), dan tidak diperhitungkan dalam LRA.

Selain adaptasi SiLPA ke LRA, keuntungan atau kerugian rilis investasi jangka pendek ditampilkan dalam informasi operasional. Dengan harga pemasaran atau pengecualian yang berbeda dan nomor terdaftar untuk investasi jangka pendek yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap uang tunai, investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian tersendiri di luar 4 (empat) kegiatan yang terdapat dalam LAK.

- a. Keadaan berbeda yang harus diungkapkan dalam data moneter otoritas publik terkait dengan modal sementara.
- b. Praktik akuntansi untuk menghitung angka investasi jangka pendek.
- c. Jenis modal.
- d. Perubahan harga pasar.
- e. Angka penyusutan modal penting dan faktor penyebabnya.
- f. Kapital yang diperkirakan pada nilai-nilai alami dan alasan untuk menggunakannya.
- g. Perubahan posting spekulasi.

Satuan kerja tidak diperbolehkan melakukan investasi jangka pendek, kecuali satuan kerja BLU. Satker BLU dapat menempatkan sumber daya ke dalam rencana penyalahgunaan uang yang tidak aktif. Perdagangan ganda uang tunai biasanya sebagai dana cadangan. Apabila penggunaan kas operasi BLU untuk investasi jangka pendek telah disetujui oleh Daya BUN, maka investasi tersebut memenuhi syarat sebagai investasi jangka pendek dan termasuk dalam SiLPA atau SAL. Dengan asumsi bahwa uang yang digunakan BLU untuk usaha sesaat dimulai dari uang jajan yang akan atau belum dikeluarkan, maka pada saat itu spekulasi tersebut diperkenalkan sebagai warisan lain dan tidak penting bagi SiLPA atau SAL.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Jenis-jenis Investasi Jangka Panjang

Pemerintah dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu:

a. Investasi Permanen

Investasi permanen adalah investasi untuk jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara terus menerus atau dimiliki secara terus menerus tanpa ada keinginan untuk diperdagangkan atau ditarik kembali. Yang dimaksud dengan "modal permanen" adalah penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan melainkan untuk menghasilkan dividen, mempunyai efek jangka panjang yang signifikan, atau menjaga ikatan kelembagaan berupa:

- 1) Penyertaan Modal Negara (PMN) pada industri dalam negeri, organisasi global, dan organisasi lainnya. Entah pesan non-nilai atau pembagian nilai dalam perseroan terbatas dapat melibatkan modal berdaulat. Asosiasi modal pemerintah sebagai pesan non-harga adalah kepemilikan modal dalam usaha yang tidak dibatasi tanggung jawab organisasi atau badan atau organisasi luar biasa.
- 2) Investasi Permanen Pihak berwenang memiliki orang lain untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan layanan masyarakat. Jenis modal permanen yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai melibatkan modal yang berkuasa dalam industri negara bagian atau regional, organisasi global dan entitas bisnis lain yang bukan milik negara dikenal sebagai "investasi permanen lainnya".

b. Investasi Non Permanen

Investasi non permanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 bulan dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus/berkelanjutan atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi nonpermanen dapat berupa:

- 1) Memperoleh surat pinjaman atau memesan pinjaman jangka panjang

yang akan ditahan sampai tanggal jatuh tempo.

- 2) Investasi keuangan dalam cetak biru pembangunan yang dapat dialihkan.
- 3) Dengan bergulir pada kelompok warga (anggaran bergulir), anggaran otoritas untuk layanan warga bertindak sebagai semacam stimulus untuk modal aktivitas.
- 4) Modal tidak tetap lainnya, seperti pengalihan modal yang ditujukan untuk pemulihan atau keamanan ekonomi yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki oleh penguasa dalam jangka panjang.

Investasi dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: pengeluaran tunai dan/atau warisan, pendapatan sumbangan berupa modal, dan perubahan piutang atau warisan lainnya:

- a. Ada kemungkinan bahwa investasi semacam itu akan menghasilkan manfaat atau layanan sosial dan ekonomi di masa depan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.
- b. Selanjutnya, Tingkat akuisisi atau tingkat modal alami dapat diukur secara akurat.

Bagan akuisisi investasi jangka panjang mengakui pengeluaran kas sebagai pengeluaran pembiayaan. Jika tidak, penerimaan pembiayaan diakui sebagai pendapatan tunai dari penjualan atau pemasaran investasi jangka panjang. LRA mencantumkan biaya dan keuntungan yang terkait dengan pembiayaan. Jika ada perbandingan antara angka-angka yang tercatat dengan hasil pelepasan modal, maka harus ditimbang atau dikreditkan pada laba rugi pembebasan modal pada saat pemasaran atau pelepasan modal. LO menampilkan keuntungan atau kerugian pembebasan modal.

Hasil investasi seperti dividen tunai (*cash dividen*) dan baik LRA maupun LO menghitung bunga sebagai pendapatan. Di sisi lain, keuntungan modal dalam bentuk dividen saham diungkapkan dalam memo informasi keuangan tetapi tidak termasuk

dalam LRA atau LO sebagai pendapatan yang baik.

Metode yang digunakan untuk menilai investasi pemerintah adalah:

a. Metode Biaya

Investasi dicatat sebesar biaya perolehan dengan cara pembayaran, baik pada saat investasi awal maupun sesudahnya. Biaya modal ventura itu sendiri dan setiap biaya yang ditunjukkan pada bagan akuisisi modal sudah termasuk dalam biaya akuisisi. Metode pembayaran digunakan untuk:

- 1) Investasi permanen dengan kepemilikan kurang dari 20%.

Jumlah modal yang ditanamkan pada usaha asosiasi atau badan hukum tidak dipengaruhi oleh pendapatan dari modal tersebut, yang diakui sebesar bagian dari hasil yang diperoleh. Bagian keuntungan pemerintah dalam bentuk dividen tunai dicatat sebagai pendapatan dari capital gain selama proses pembayaran.

- 2) Investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki dalam jangka waktu yang lama seperti letter of credit atau perintah pinjaman jangka panjang.

- 3) Kepentingan yang tidak bertahan lama seperti kepentingan dalam proyek-proyek perbaikan pemerintah (seperti Diagram untuk Kawasan Inti atau PIR). Biaya pengembangan, seperti biaya pemrograman dan biaya lain yang dikeluarkan dalam bagan penanganan cetak biru hingga cetak biru diberikan kepada pihak ketiga disebut sebagai biaya akuisisi.

b. Metode Ekuitas

Modal tetap dengan kepemilikan negara paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau kepemilikan negara kurang dari 20% (dua puluh persen) tunduk pada metode ekuitas, yang memiliki dampak yang signifikan. Dalam teknik nilai, spekulasi yang mendasari dicatat di dalam memperoleh biaya. Harga perusahaan investasi itu sendiri dan biaya lainnya yang ditunjukkan dalam bagan akuisisi modal termasuk dalam definisi biaya akuisisi. Rasio

keuntungan (kerugian) pemegang saham setelah kebetulan akuisisi terhadap pendapatan dividen tunai dari saham pemerintah digunakan untuk mengevaluasi modal pada saat yang sama dengan disajikannya cakupan keuangan.

Bagian keuntungan sebagai keuntungan uang yang diperoleh badan publik dicatat sebagai gaji dari spekulasi yang menghasilkan Data Fungsional dan memotong angka modal badan publik yang belum ditentukan Lembarnya. Namun, dividen yang diterima dalam bentuk saham tidak berpengaruh terhadap modal penguasa. Laba tunai yang dilaporkan dalam RUPS dianggap sebagai piutang laba dan turunan dari modal pemerintah. Otoritas akan mengurangi piutang dividen dengan memperoleh dividen tunai. Dalam informasi realisasi perhitungan, pendapatan dari hasil investasi akan dicatat sebagai pendapatan dari dividen tunai. Variasi angka modal juga diperkirakan akan mengubah porsi kepemilikan angka modal badan publik, misalnya ada perubahan yang berdampak karena asingnya perdagangan, kontrak antara badan publik dengan BUMN dan revaluasi sumber daya yang sangat tahan lama.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan (*netrealizable value*) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk:

- 1) Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
- 2) Investasi non permanen berbentuk dana bergulir.

Untuk memastikan bahwa angka-angka investasi yang tercantum di neraca secara akurat mencerminkan angka bersih yang dapat direalisasikan, perlu dilakukan upaya penyesuaian terhadap modal tidak tetap secara periodik (*net realizable value*).

Pengelolaan modal sesuai dengan jatuh tempo (*aging schedule*) dapat mengarah pada realisasi angka tersebut. Jumlah investasi yang tidak dapat

dikumpulkan atau direalisasikan juga investasi yang tidak dapat ditagih secara pasti dan investasi yang dapat dikumpulkan atau direalisasikan semuanya akan diketahui berdasarkan administrasi ini.

Dengan mengurangi angka modal tidak tetap yang tidak pasti atau terealisasi dari angka modal tidak tetap awal yang dicatat pada harga perolehan, angka yang dapat direalisasi digunakan untuk mengukur modal tidak tetap di neraca. Jika investasi tidak tetap benar-benar tidak tertagih atau terealisasi dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku, maka investasi tersebut dapat dihapusbukukan.

Akun lawan (*contra account*) Pengeluaran modal tidak tetap yang belum tentu dapat tertagih atau terealisasi adalah dari modal tidak tetap. Dalam beberapa kasus, metode penilaian modal tidak ditentukan oleh patokan besaran persentase kepemilikan saham. sebaliknya, tingkat pengaruh atau regulasi industri investee lebih pasti.

Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- a. kecakapan dalam mempengaruhi susunan dewan komisaris.
- b. Keterampilan untuk mendelegasikan atau memegang kendali atas dewan.
- c. Kemampuan untuk memilih dan mengatur ulang badan dewan industri investor.
- d. Pengetahuan tentang bagaimana mengontrol suara mayoritas dalam rapat dewan.

Jumlah investasi diakui sama dengan nilai wajar investasi yang diterima jika investasi jangka panjang diperoleh dari perubahan warisan penguasa. Dengan asumsi bahwa angka rata-rata untuk usaha yang didapat tidak ada, angka spekulasi dianggap setara dengan angka rata-rata untuk warisan yang diberikan atau jumlah buku untuk warisan yang diberikan jika angka rata-rata tidak diketahui karena warisan yang sangat tahan lama, angka yang biasanya diperdagangkan biasanya lebih tinggi dari angka aslinya, jadi yang penting lebih dicatat sebagai pembayaran LO.

Dengan menggunakan kurs konversi yang sah (kurs tengah Bank Esensial) pada saat bisnis, harga perolehan investasi yang dibayarkan dalam mata uang asing yang sama harus diklaim dalam rupiah. Pada saat pelaporan, modal dalam mata uang asing diklaim dalam mata uang Rupiah dengan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Sentral. Di neraca, ditampilkan perbedaan kurs konversi mata uang asing ke Rupiah antara perolehan modal dan pelaporan.

Islam sangat menekankan agar setiap para investor berlaku profesional dalam mengelola sumber-sumber modal yang telah dimudahkan oleh Allah Swt padanya, sehingga dia dapat menggunakannya pada objek yang tepat serta menginvestasikan modal yang dimiliki untuk hal-hal yang dibolehkan dalam syariah. ” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’: 29)

Menurut hasil penelitian (Sadjiarto, 2020), Kinerja pemerintah dapat diukur dengan menggunakan tiga indikator seperti penanda untuk menghubungkan upaya dengan pencapaian, penanda untuk mengukur pencapaian pelayanan, dan penanda untuk mengukur upaya pelayanan. Di sisi lain, data keuangan seperti pengembalian investasi unit, jumlah energi yang digunakan, atau rasio pendapatan terhadap penggunaan energi tidak dapat digunakan untuk mengukur kinerja rezim atau unit. Akibatnya, tanggung jawab sistem tidak dapat diisi dengan informasi moneter saja.

Kinerja pemerintah memiliki konsep pengukuran kinerja yang dilaksanakan pada implementasi dengan harapan bisa membawa perbaikan secara publik. Pada sistem pengukuran kinerja pemerintah akuntabilitas adalah tujuan utama yang harus dicapai. Maka dari itu, faktor yang mempengaruhi sebuah pengukuran kinerja pemerintah adalah hubungan pengukuran

kinerja dan akuntabilitas. (Wargadinata, 2019)

Hasil penelitian (Novatiani et al., 2019), menunjukkan bahwa kinerja pemerintah yang baik adalah yang sudah memenuhi indikator kinerja pemerintah seperti adanya masukan (*input*), proses (*process*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Selain itu, kinerja pemerintah juga bisa dilihat dari berpengaruhnya sebuah transparansi dan akuntabilitas pemerintah ke masyarakat (*publik*).

Mendefinisikan kinerja pemerintah yaitu sebuah sejauh mana kegiatan, program, atau kebijakan pemerintah berkontribusi pada pencapaian tujuan lembaga. Kapasitas penguasa juga menggambarkan konsekuensi dari latihan yang dilakukan oleh penguasa dalam melakukan tugas-tugas yang diberikan kepadanya sehubungan dengan kemampuan, pengalaman dan keterampilan.

Hasil penelitian (Sunarti et al., 2019), kinerja pemerintah akan lebih baik jika pengelolaan dan sistem keuangan pemerintah sudah baik. Kinerja pemerintah juga bisa dilihat dan diukur dengan aturan/prosedur dalam melakukan latihan dan mencoba ketelitian panjang dalam pembuatan barang dan administrasi. Tidak hanya itu, dalam membuat kemampuan sistem yang baik yayasan dapat menyelesaikan evaluasi batas yang terkait dengan administrasi keuangan daerah maupun negara.

Kinerja sebagai suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang yang juga harus memiliki tingkat tekad dan kemampuan tertentu. Tanpa penjelasan yang valid tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, kemauan dan keterampilan seseorang tidak cukup untuk mencapai sesuatu. Kemampuan adalah sikap yang jelas ditunjukkan oleh setiap karyawan melalui aktivitas yang mereka lakukan sesuai dengan posisinya dalam organisasi.

Kapasitas pekerja adalah sesuatu yang vital dalam upaya asosiasi untuk

mencapai tujuan. Yayasan biasanya mendasarkan tujuan pemrograman yang akan dicapai di masa depan dengan sikap yang diharapkan dari keseluruhan fakultas dalam membuat tujuan tersebut. Tujuan utama tinjauan kinerja karyawan adalah untuk menginspirasi pekerja untuk memenuhi standar perilaku dan tujuan bedah yang telah ditentukan sebelumnya. Kapasitas dalam suatu kantor merupakan salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam menjalankan komitmen kantor, baik dalam sistem maupun rahasia kantor.

Definisi kinerja Hal di atas menggambarkan cerminan mengenai tingkat upah pelaksanaan komitmen yang diupayakan oleh seluruh pekerja dalam suatu organisasi atau lembaga administrasi. Dalam hal optimalisasi suatu kegiatan, badan dan lembaga pengatur harus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dalam diri mereka. Dalam konteks pencapaian tujuan, "kapasitas rezim" mengacu pada sekelompok individu dalam suatu badan yang masing-masing memegang otoritas dan tanggung jawab untuk melaksanakan manfaat atau tanggung jawab rezim. Pegawai negeri yang merupakan bagian dari badan atau badan pengatur juga termasuk. Kesan tubuh yang mendalam memengaruhi dan mengabaikan tanda peringatan kemampuan.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana fokus penelitian ini yaitu mendalami permasalahan subjek penelitian secara spesifik dari seluruh aspek personalitas yang berkenaan pada objek penelitian, penelitian ini juga kerap disebut dengan penelitian observasi kasuistik. (Ulfatin, 2022)

Secara sederhana, Metodologi penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif adalah model penelitian kuantitatif yang menawarkan pendekatan kualitatif. ilmuwan menyelesaikan eksplorasi kuantitatif dengan memanfaatkan survei atau jajak pendapat untuk

mengumpulkan data. Jajak pendapat atau survei ini merupakan teknik pengumpulan data yang signifikan dalam metodologi kuantitatif yang dijadikan sebagai bahan dalam melakukan pengujian data, baik data terukur ilustratif maupun data faktual inferensial. Peneliti kemudian melanjutkan ke langkah kedua, yaitu mencoba memberikan informasi statistik yang diperoleh melalui instrumen tanya jawab makna yang lebih dalam berdasarkan temuan analisis ini. (*In-Depth Interview*) terhadap informan yang mengetahui secara persis obyek penelitian. (tatang parjaman, 2019)

Proses memilih atau mengambil sampel pada penelitian ini adalah menggunakan teknik *Simple random sampling* yaitu mengambil ilustrasi tubuh populasi yang diuji secara acak tanpa mempertimbangkan level dalam populasi. Sebab itu, sampel pada penelitian ini ditentukan berdasarkan kriteria yang berkesesuaian. (roflin, e, 2021)

Macam-macam penggambaran oleh analisis adalah dengan menyebarkan polling secara online kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pemodal dan Kepala Badan Usaha. Penulis mengolah informasi dengan memilih syarat utama, meringkas informasi dan melakukan analisis induksi setelah data terkumpul. Kegiatan mengumpulkan informasi, mereduksi informasi, menyajikan informasi, dan menarik kesimpulan dicantumkan sebagai bagian dari kegiatan analisis induksi interaktif. (Firmansyah, 2022).

Pada penelitian ini data yang diambil adalah primer, dimana peneliti mengumpulkan data sendiri dan diperoleh secara langsung dari objek penelitian. (Zainuddin, M, 2020).

Penelitian dilakukan langsung ke kantor desa Ulumahuam untuk mendapatkan keabsahan data yang sesungguhnya dengan menggunakan 2 teknik penelitian diantaranya wawancara secara langsung dengan narasumber utama yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Kaur Pemerintahan. Adapula data tambahan dengan melakukan jajak pendapat melalui kuisisioner yang dibagikan secara daring dengan tambahan narasumber Kepala Dusun di desa tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

1.1 Uji Kualitas Data

1.1.1 Uji Validitas

Variabel X (Kinerja Pemerintah)

Tabel 1. Uji Validitas Variabel X

TOTAL_X	Pearson Correlation	Sig.(2-tailed)	N
X1	,732	,000	11
X2	,531	,000	11
X3	,667	,000	11
X4	,606*	,000	11
X5	,652	,000	11
X6	,743	,000	11
X7	,904**	,000	11
TOTAL_X	1		11

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2- tailed).

**..Correlation is significant at the0.01 level (2- tailed).

Dasar Pengambilan Keputusan:

- Jika nilai signifikansi $<0,05$, maka data tersebut valid.
- Jika nilai signifikansi $>0,05$, maka data tersebut tidak valid.

Berdasarkan Output SPSS diatas maka dapat dilihat bahwa semua butir pertanyaan tersebut valid karena semua nilai signifikansi (yang di blok kuning) $<0,05$.

Variabel Y (Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dengan Investasi)

Tabel 2. Uji Validitas Variabel Y

TOTAL_Y	Pearson Correlation	Sig.(2-tailed)	N
Y1	,929**	,000	11
Y2	,901**	,000	11
Y3	,611*	,046	11
Y4	,736**	,010	11
TOTAL_Y	1		11

**..Correlation is significant at the 0.01 level (2- tailed).

*.Correlation is significant at the 0.05 level (2- tailed).

Dasar Pengambilan Keputusan:

- Jika nilai signifikansi $<0,05$, maka data tersebut valid.
- Jika nilai signifikansi $>0,05$, maka data tersebut tidak valid.

Berdasarkan Output SPSS diatas maka dapat dilihat bahwa semua butir pertanyaan tersebut valid karena semua nilai signifikansi (yang di blok kuning) <0,05.

1.2 Uji Reliabilitas

Variabel X (Kinerja Pemerintah)

Cronbach's Alpha	Nof Items
,816	7

Variabel Y (Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dengan Investasi)

Tabel 4.Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	Nof Items
,805	4

Dasar Pengambilan Keputusan:

- a. Jika nilai cronbach alpha >0,60, maka data tersebut reliabel.
- b. Jika nilai cronbach alpha <0,60,maka data tersebut tidak reliabel.

Berdasarkan Output SPSS diatas maka dapat dilihat bahwa nilai cronbach alpha (yang di blok kuning) >0,60 maka artinya semua data tersebut reliable dan dapat dilakukan uji selanjutnya.

1.3 Analisis Regresi Linear Sederhana

Tabel 5.Analisis Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	9,227	16,655		,554	,593
Implementasi standar Akuntansi pemerintahan dengan investasi	,173	,729	,079	,238	,817

- a. Dependent Variable : Kinerja Pemerintah
- b. Predictors: (Constant), Implementasi standar akuntansi pemerintahan dengan investasi

Berdasarkan tabel hasil regresi linear berganda diatas, maka diperoleh persamaan regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y = \alpha + \beta X$$

$$Y = 9,227 + 0,137X$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Nilai konstanta (a) sebesar 9,227. Artinya adalah apabila implementasi standar akuntansi pemerintahan dengan investasi diasumsikan

bernilai nol (0), maka kinerja pemerintah tetap sebesar 9,227.

- 2. Nilai koefesien regresi 0,137 dan bernilai positif menyatakan bahwa jika implementasi standar akuntansi pemerintahan dengan investasi mengalami peningkatan 1 satuan, maka kinerja pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar 0,137.

1.4 Uji F

Tabel 6.Uji F

	Model	Sumof Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,410	1	,410	,057	,817 ^b
	Residual	65,227	9	7,247		
	Total	65,636	10			

a. Dependent Variable : Kinerja Pemerintah

b. Predictors : (Constant), Implementasi standar akuntansi pemerintah dengan investasi

Dasar Pengambilan Keputusan:

- Jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka terdapat pengaruh antara variable X terhadap variabel Y secara bersamaan.
- Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh antara variable X terhadap variabel Y secara bersamaan.

Berdasarkan hasil output SPSS diatas maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansi (0,817) $> 0,05$ artinya tidak terdapat pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dengan investasi terhadap kinerja pemerintah atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa implementasi SAP dengan investasi tidak sesuai dengan kinerja pemerintah.

3.2. Pembahasan

Menguatkan hasil penelitian olah data diatas, peneliti juga melakukan penelitian *In-Depth Interview* (wawancara mendalam) yang Penelitian ini menggunakan format tanya jawab dengan interaksi tatap muka antara pewawancara dan responden (interview) untuk mendapatkan penjelasan secara detail).

Dalam jenis penelitian ini pewawancara dan informan secara mendalam dan terbuka membahas masalah

dan focus penelitian terkait implementasi standar akuntansi pemerintah (SAP) dengan investasi terhadap kinerja pemerintah yang dilakukan oleh Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Bapak Baharuddin Tambak, sebagai Kepala Desa Ulumahuam selaku informan menjelaskan pendapatnya terkait investasi dan SAP yang dilakukan oleh desa. "Investasi merupakan suatu kegiatan yang melibatkan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan" jelasnya.

Pada pertanyaan terkait implementasi Investasi yang dilakukan apakah sudah menyesuaikan dengan SAP 06 No. 22/PMK.05/2022. Informan menjelaskan "Pemerintah desa berupaya menyesuaikan hal itu dengan melakukan pencatatan seluruh transaksi yang dilakukan oleh desa Ulumahuam dan berupaya seluruh transaksi keuangan dibuktikan dengan bon ataupun nota sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang dapat digunakan oleh pihak yang berhubungan dengan keuangan desa" ungkapnya.

Alasan desa Ulumahuam berupaya melakukan investasi dengan menyesuaikan SAP 06 menurut informan adalah karena Hak peran Desa dalam pengelolaan keuangan dapat diukur dengan uang diharapkan juga dapat dikelola dengan

transparan dan bertanggungjawab.

Informan juga mengatakan bahwa terdapat kesulitan dan kendala dalam melakukan investasi dengan menyesuaikan SAP 06, yaitu:

1. Kurang tepat waktu dalam penyajian laporan keuangan desa
2. Keseluruhan dalam pencatatan laporan keuangan
3. Lupa dalam penyimpanan bukti-bukti transaksi

Selain berupaya menyesuaikan dengan SAP 06 terkait investasi, informan mengatakan acuan pemerintah desa dalam melakukan investasi adalah dengan melihat potensi di desa dan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri yang nantinya akan menjadi investasi di desa.

Terdapat strategi dan konsep lain yang digunakan desa ulumahuam dalam melakukan investasi, yaitu:

1. Dengan adanya potensi dan inovasi di desa ini salah satu faktor untuk melakukan investasi.
2. Skala Prioritas yang ada di desa.

Informan menegaskan bahwa “Desa melakukan investasi dalam bentuk peralatan seperti keyboard, kamera canon desa, teratak desa, dekorasi desa dan sapi desa yang semua merupakan investasi.”

Jika ditinjau dari sisi keislaman. Oleh sebab itu dasar pijakan dari aktivitas ekonomi termasuk investasi adalah Al-Qur’an dan hadis Nabi saw. Selain itu, karena investasi merupakan bagian dari aktivitas ekonomi (muamalahmaliyah), sehingga berlaku kaidah fikih, muamalah, yaitu “pada dasarnya semua bentuk muamalah termasuk di dalamnya aktivitas ekonomi adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”(Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000).

QS. Al-Baqarah [2] 268

الشَّيْطَانُ يَجْعَلُكُمُ الْفُقَرَاءَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَجْعَلُكُمْ مَغْفُورَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dalam Al Quran terdapat beberapa ayat yang secara tidak langsung berkenaan dengan investasi di antaranya pada QS Yusuf: 46-49 dan QS al Hasyr : 18 dan QS Lukman: 34 yang dipahami sebagai usaha

mempersiapkan dan menjaga diri. Pada QS al Isra: 26-27 dan QS al Furqan:67 tentang larangan berlaku boros dan membatasi pengeluaran konsumtif. QS Annisa: 9 menjaga sikap dengan hat-hati dan perhitungan terhadap generasi yang akan datang yang lebih baik. Hadits riwayat Abu Daud tentang kebolehan mengadakan perdamaian selama tidak dilakukan untuk menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan yang halal. Kaidah fikih yang menyatakan kebolehan pada semua kegiatan muamalah sebelum ada larangan yang mengharamkannya.(Mukrimaa et al., 2016)

Penelitian (Rosana & Bharata, 2023), mengemukakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan pedoman dan prinsip akuntansi yang diterapkan pada saat proses menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Akuntansi serta laporan keuangan memiliki makna sebagai suatu proses mengumpulkan, mengolah sebuah informasi untuk menilai kinerja organisasi atau bermanfaat pada pengambilan keputusan.

Sedangkan, berdasarkan PSAP 06 tentang akuntansi investasi, dijelaskan bahwa desa Ulumahuam belum/tidak menyesuaikan laporan keuangan terkait investasi seperti yang dijelaskan pada SAP 06 serta laporan keuangan terkait investasi juga belum maksimal.

Ibu Sarini, sebagai Sekretaris Desa Ulumahuam selaku informan menjelaskan bahwa “Ada kendala menerapkan SAP 06 pada investasi jangka pendek yakni pemerintah desa kurang memahami SAP 06, namun pihaknya melakukan laporan pembukuan keuangan desa dengan dilengkapi suatu order pesanan, bon faktur, dokumentasi dan berita serah terima. Sedangkan untuk kendala menerapkan SAP 06 pada investasi jangka panjang adalah kurang memahami SAP 06 sehingga untuk membuat laporan keuangan belum maksimal,” jelasnya.

Menurut informan pengakuan/pengeluaran untuk memperoleh dalam investasi yang telah dilakukan adalah

dengan melakukan laporan keuangan desa melalui sistem keuangan desa. Sementara Pengakuan, Pengukuran, Penyajian/Pengungkapan dan Perlakuan Khusus investasi yang dilakukan belum sesuai dengan SAP 06 tentang investasi.

Informan mengatakan, "Jika diklasifikasikan berdasarkan SAP 06 terdapat investasi jangka panjang yang dimiliki pemerintah desa ulumahuam yaitu pembangunan infrastruktur. Serta ada Investasi yang disertakan kedalam infrastruktur desa. Implementasi dari investasi tersebut adalah pemerintah desa yang dihadapkan pada persoalan terbatasnya anggaran sehingga tidak semua pembangunan bisa di bangun."

Oleh karena itu, peneliti menemukan bahwa apa yang dijelaskan oleh pihak desa terkait implementasi Standar Akuntansi dengan Investasi belum sesuai dengan PSAP 06 tentang akuntansi investasi, karena investasi yang dijelaskan pada PSAP 06 Ini mengatur perlakuan akuntansi investasi jangka pendek dan jangka panjang, yang harus mencakup prosedur akuntansi modal untuk pengakuan, klasifikasi, pengukuran, dan pengungkapan data keuangan. Sampai saat itu, Modal untuk PSAP 06 merupakan warisan yang direncanakan untuk mendapatkan keuntungan finansial seperti bunga, keuntungan dan biaya, atau keuntungan yang berpotensi bersahabat, sehingga dapat memperluas kapasitas para ahli dalam menawarkan jenis bantuan ke daerah setempat. (Sugiyanto, 2020)

Islam membekali diri bagaimana untuk melaksanakan sikap tanggungjawab. Hal tersebut sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan konsep tanggungjawab. Mulai tanggungjawab Umat terhadap Rabbnya, terhadap keluarga, masyarakat dan juga terhadap negara. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Mudtastsir ayar 38 yang artinya "Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah di perbuatnya"

Berdasarkan temuan penelitian dari Ibu Wila Sriningsih, sebagai Bendahara Umum Desa Ulumahuam selaku informan,

sepanjang desa melakukan investasi tidak ada yang menyebabkan kerugian. " Tidak ada kerugian karena investasi yang dilakukan secara terbuka dan transparan, jadi tidak ada kerugian. Pernerintah desa tidak memperjualbelikan asset, sebab asset investasi pemerintah desa telah dicatat dan dilaporkan ke dinas pemberdayaan masyarakat desa kab. Labuhan batu selatan (DPM Des)."

Turijan, sebagai Kepala Urusan umum Desa Ulumahuam selaku informan juga menyampaikan penjelasannya, "Investasi yang dilakukan oleh desa memberikan manfaat keseluruhan elemen desa. Manfaat yang diterima elemen desa yakni terhindar dari inflasi, kesempatan mendapat penghasilan tambahan, membantu membangun kesejahteraan dan tercapainya tujuan finansial." jelasnya.

Menurutnya gagasan pemerintah desa dalam melakukan investasi adalah menciptakan stabilitas kondisi politik, social dan ekonomi. Kemudian, membangun pemerintah desa yang bebas dari korupsi dan menciptakan konsistensi, kejelasan dan kepastian pemerintah jangka panjang.

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat investasi yang dilakukan diluar rancangan desa ulumahuam yaitu usaha pembibitan dan pembiakan sapi, dan usaha sewa sound sistem. (kepemilikan desa). Usaha tersebut dikategorikan investasi dalam bentuk barang yang menghasilkan keuntungan atas jasa (*keyboard*) dikategorikan dalam bentuk program ketahanan pangan yang menghasilkan keuntungan atas perternakan sapi. Misalnya 10 ekor sapi menjadi 20 ekor dalam jangka waktu 3 tahun kemudian Keuntungan hasil tersebut masuk kedalam kas desa.

Dalam hal ini mencakup pembahasan terkait perumusan masalah pada poin ketiga dimana pada beberapa investasi yang disebutkan diatas nilai guna dan nilai komisi kas diterima kemudian ditambahkan dan diakumulasikan oleh pemerintah desa. Kemudian nilai guna dan nilai komisi diatas secara tidak langsung dirasakan masyarakat seperti adanya event dari desa tentang

hiburan masyarakat, Kompetisi yang melibatkan pemuda/i setempat dengan kucuran dana dari investasi diatas.

4. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil output SPSS diatas maka dapat dilihat bahwa nilai signifikansi $(0,817) > 0,05$ artinya tidak terdapat pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dengan investasi terhadap kinerja pemerintah atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa implementasi SAP dengan investasi belum dan tidak sesuai dengan kinerja pemerintah dibuktikan dengan tidak dilakukannya Pengakuan, Penyajian, Pengukuran dan Perlakuan Khusus dalam melakukan Investasi.
2. Peneliti juga menemukan bahwa apa yang dijelaskan oleh pihak desa terkait manfaat dari Investasi yang dilakukan dapat dirasakan oleh masyarakat desa, perangkat desa hingga pemerintah desa dengan Manfaat yang diterima elemen desa yakni terhindar dari inflasi, kesempatan mendapat penghasilan tambahan, membantu membangun kesejahteraan dan tercapainya tujuan finansial. Dalam hal ini investasi juga dianjurkan dalam islam dengan tetap memperhatikan hukum sesuai syariat dan nilai nilai keislaman.
3. Informan menjelaskan bahwasanya dari beberapa investasi yang di jalankan selain memberikan manfaat juga mendapat keuntungan secara finansial yang dapat dipergunakan untuk keperluan dan operasional elemen desa.
4. Setelah dilakukan penelitian maka terdapat saran dari peneliti

bahwasanya sebaiknya dan seharusnya sudah menjadi pekerjaan rumah yang harus diperbaiki terkait Implementasi SAP 06 (Investasi) dimulai dari hari ini dan seterusnya dengan mencoba mempelajari secara perlahan oleh Pemerintah Desa Ulumahuam Kecamatan Silangkitang Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih banyak kepada kedua orang tua yang telah mendoakan sampai sejauh ini, Kepada Bapak Hendra Harmain yang sudah berkontribusi dalam penulisan artikel, Kepada Ibu Arnida Wahyuni yang telah membantu menyelesaikan penulisan artikel, Kepada Paman Amrizal Sasmita yang sudah memotivasi mental dan pikiran saat pengerjaan kepenulisan artikel. Penulis mengucapkan Terima Kasih banyak kepada pihak kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah menjadi tempat menuntut ilmu dan Terima Kasih banyak kepada pihak Pemerintah Desa Ulumahuam yang telah bersedia menjadi tempat penelitian serta responden atau narasumber pada kesempatan ini.

REFERENSI

- Agindawati, I. N. (2019). implementasi kebijakan publik dari perspektif penyelenggaraan pengawasan. *Jurnal Inspirasi*.
- Dian Hardiana, I. (2021). implementasi kebijakan bantuan langsung tunai (Blt) Dana desa bagi masyarakat terdampak covid-19 di kabupaten sumedang:isu dan tantangan. *Jurnal Inspirasi*.
- Endah Christianingsih. (2020). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di kabupaten bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*,

18(2), 22–41.
<https://doi.org/10.59050/jian.v18i2.141>

366

Fatimah, F. (2021). Implementasi Budaya Religius dalam Membina Akhlak Siswa di MI Rahmatullah Kota Jambi. *Jurnal Pendidikan Guru*, 2(1), 68–78. <https://doi.org/10.47783/jurpendigu.v2i1.189>

Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM INVESTASI SYARIAH Ina. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.

Novatiani, A., Rusmawan Kusumah, R. W., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1), 51–62. <https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983>

roflin, e, i. (2021). populasi, sampel, variabel dalam penelitian kedokteran, bojong pekalongan. In *penerbit nem*.

Rosana, L., & Bharata, R. W. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnalku*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i1>

Sugiyanto, H. (2020). Analisis Investasi Pemerintah Pusat Pada Lembaga Keuangan Internasional. *Financial: Jurnal Akuntansi*, 6(2), 179–187. <https://doi.org/10.37403/financial.v6i2.162>

Sunarti, N., Lestari, N. N. Y., Yanti, P. P., Asty, L. G. W., Uzlifah, U., & Mayuni, N. K. L. (2019). Pengelolaan Keuangan Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pemerintah Desa Pacung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), 42–50. <https://doi.org/10.23887/jinah.v8i1.19860>

tatang parjaman, D. . (2019). pendekatan penelitian kombinasi sebagai “jalan tengah” atas dikotomi kuantitatif-kualitatif. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.

Ulfatin, N. (2022). metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan: teori dan aplikasinya. *Mnc Publishing*.

Wargadinata, E. (2019). PENGUKURAN KINERJA DAN AKUNTABILITAS ORGANISASI PUBLIK. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 17(1), 77–90. <https://doi.org/10.34010/miu.v17i1.2226>

wikiapbn. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 06*.